

UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN BONGKAR MUAT di KSOP KHUSUS BATAM TAHUN 2020 - 2021

Zulyani¹, Romadhoni², Khairullani¹

¹Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Bengkalis, Desa Meskom Kabupaten Bengkalis, Riau

²Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis, JL. Leseng Sungai Alam, Bengkalis, Riau

Email : zulyani@polbeng.ac.id, romadhoni@polbeng.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemungutan PNBPN, faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan PNBPN belum optimal dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PNBPN pada kegiatan bongkar muat di KSOP Khusus Batam. Metode pengumpulan data ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang menyebabkan PNBPN pada kegiatan bongkar muat belum optimal di KSOP Khusus Batam adalah pandemic Covid 19 yang belum berakhir sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan KSOP ialah meningkatkan kualitas pelayanannya, membuat aksi proaktif, menyempurnakan tata kelola PNBPN, serta meningkatkan fasilitas pendukung secara berkala.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Otoritas Pelabuhan.

Abstract

The purpose of this study is to determine the process of collecting PNBPN, the factors that cause PNBPN receipts to be not optimal and the efforts made to optimize non-tax state revenue (PNBPN) receipts for loading and unloading activities at the Batam Special Port Authority. This data collection method is by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the factor that causes non-tax state revenue on loading and unloading activities to be not optimal is the Covid 19 pandemic which has not yet ended completely. Efforts that have been made are to improve the quality of its services, make proactive actions, improve non-tax state revenue governance, and improve supporting facilities on a regular basis.

Keywords: Optimization, Non-Tax State Revenue, Port Authority.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran perdagangan baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga banyak bermunculan bidang usaha pelayaran didalam negeri. Bidang usaha pelayaran meliputi suatu kegiatan dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang atau logistik untuk perjalanan dari satu pelabuhan kepelabuhan lain. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas dan efisiensi operasional kapal di pelabuhan adalah hubungan yang kondusif dan koordinasi dengan instansi - instansi yang berkepentingan dalam operasional kapal selama di pelabuhan[1].

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) merupakan instansi yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam adalah salah satu kantor otoritas pelabuhan diberikan tugas melaksanakan pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan wilayah Ekonomi Khusus Batam dan sekitarnya[8,9].

KSOP Khusus Batam sebagai salah satu Intansi penerima pendaatan negara bukan pajak masih dihadapkan pada penerimaan yang

belum optimal. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya dalam penerimaan negara bukan pajak khususnya pada kegiatan bongkar muat. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan demi mewujudkan optimalisasi pelayanan yang prima [2].

Mengoptimalkan pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha meningkatkan kepuasan pengguna jasa sekaligus meningkatkan penerimaan negara non pajak. Menurut beberapa pihak yang berhubungan dengan jasa pelayanan ini menyatakan perlu adanya perbaikan dan optimalisasi agar dapat mendorong kelancaran distribusi orang dan barang di kawasan ekonomi khusus Batam. Oleh karena itu perlu dirancang strategi yang baik di masa mendatang oleh para pembuat kebijakan. Diantara yang sering menjadi keluhan perusahaan-perusahaan pelayaran sebagai pengguna adalah dalam proses pengajuan surat pernyataan kegiatan bongkar muat (SPKBM) dan nota tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

2. METODE

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam yang berlokasi di Jl. Re Martadinata, Sekupang-Batam pada periode Januari hingga Juli 2021. KSOP Khusus Batam menaungi pelabuhan-pelabuhan di kota Batam antara lain: Batu Ampar, Bintang Sungai Sembilan, Kabil, Marina, Terminal Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Batu Ampar dan Pelabuhan Domestik Punggur[3].

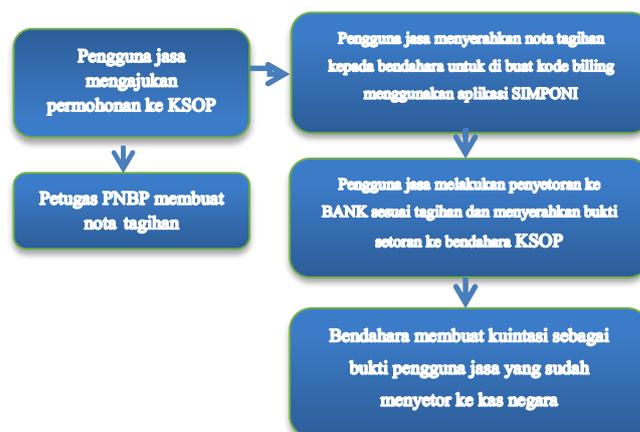
Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan

wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi yang ada dalam penelitian[4].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penerimaan PNBP di KSOP Khusus Batam

Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 1: Skema Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)[5]

Hasil pengamatan di ketahui bahwa penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh oleh Kantor KSOP Khusus Batam dari kegiatan bongkar muat terdiri dari penerimaan jasa angkutan laut dan jasa barang. Data tentang realisasi penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Angkutan Laut Semester I 2021

Uraian	Bulan	Total Kapal Masuk	Total Penerimaan
Jasa Angkutan Laut	Januari	145 Kapal	3.440.534
	Februari	165 Kapal	4.479.284
	Maret	112 Kapal	2.278.874
	April	90 Kapal	2.243.718
	Mei	88 Kapal	3.862.786

Tabel 3. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Barang Semester I 2021

Uraian	Bulan	Total kapal masuk	Total Penerimaan
Jasa barang	Januari	21 kapal	32.367.300
	Februari	24 kapal	33.096.560
	Maret	32 kapal	51.908.600
	April	18 kapal	23.944.660
	Mei	5 kapal	4.060.650

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan Bongkar Muat Jasa Angkutan Laut dengan tarif (1%) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam untuk semester I tahun 2021, pada bulan Januari sebesar Rp3.440.534. terjadi peningkatan pada bulan berikutnya sebesar Rp4.479.284. Tetapi realisasi pada bulan Maret mengalami penurunan dengan penerimaan sebesar Rp2.278.874. untuk bulan April dan Mei masing-masing sebesar Rp2.243.718. dan Rp 3.862.786. Jika diamati secara seksama realisasi dari jasa angkutan laut terjadi fluktuasi untuk periode semester I tahun 2021.

Sementara realisasi PNBP pada kegiatan bongkar muat jasa barang dengan tarif (50%) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam untuk periode semester I tahun 2021 pada bulan Januari sebesar Rp 32.367.300, terjadi sedikit peningkatan pada bulan Februari menjadi sebesar Rp33.096.560. Pada bulan Maret peningkatannya signifikan sebesar Rp51.908.600, namun pada bulan April nilai realisasinya terjadi penurunan sangat drastis yaitu sebesar Rp.23.944.660. berlanjut hingga bulan Mei hanya sebesar Rp. 4.060.650. Realisasi dari jasa barang juga fluktuatif bahkan trennya negatif.

3.2 Faktor Penyebab Penerimaan PNBP Belum Optimal di KSOP Khusus Batam

Beberapa faktor penyebab kurang optimal dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam adalah sebagai berikut[10,11]:

1. Pandemi Covid 19 yang belum berakhir
Faktor ini sangat berpengaruh pada kunjungan kapal yang masuk di wilayah pelabuhan Batam sehingga berpengaruh juga pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan bongkar muat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.
2. Kondisi cuaca yang kurang baik
Faktor ini juga berpengaruh pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam karena adanya faktor alam ini memperlambat kapal yang akan melakukan kegiatan ekspor impor yang akan masuk di wilayah pelabuhan Batam. contohnya pada saat gelombang besar dan angin kencang otomatis ini berpengaruh atau mengganggu waktu belayarnya kapal bahkan bisa saja terjadi keberangkatannya ditunda.

Selain adanya faktor eksternal ada juga faktor internal yang memengaruhi dalam

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat, diantaranya adalah sebagai berikut[6]:

1. Keterbatasan Fasilitas pendukung operasional
Keterbatasan ini meliputi jumlah unit komputer yang ada untuk penginputan kode *billing* hanya tersedia satu dan sering terjadinya trouble sehingga menjadi terhambat dalam proses penginputan kode *billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat. Termasuk akses internet yang internet yang masih minim.
2. Belum tersedianya mesin ATM atau mesin EDC (*Electronic Data Capture*)
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam belum tersedia mesin ATM atau mesin EDC (*Electronic Data Capture*) untuk mempermudah para pengguna jasa dalam melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jarak kantor bank yang jauh dari kantor KSOP sehingga butuh waktu yang relative lama jika melakukan pembayaran, hal ini termasuk salah satu yang dikeluhkan oleh para agen pelayaran.
3. Keterbatasan jumlah personil yang melayani pengurusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kegiatan Bongkar Muat Jumlah pegawai dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat pada saat penginputan kode *billing* saat ini hanya ada satu pegawai, sementara kegiatan bongkar muat setiap hari pada kondisi normal bisa mencapai 50 lebih agen pelayaran yang mengajukan Surat Persetujuan Bongkar Muat (SPKBM). Disisi lain pemahaman pegawai dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) *online* (SIMPONI) juga masih terbatas.

3.3 Upaya Optimalisasi Penerimaan PNBP di KSOP Khusus Batam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian keuangan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, juga hasil observasi yang dilakukan oleh penulis beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam diantaranya sebagai berikut[7,12]:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Salah satu cara berkesinambungan yang dilakukan di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam demi mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna jasa. Salah satu contoh pada saat agen pelayaran mengajukan Surat Pernyataan Kerja Bongkar Muat (SPKBM), maka secepatnya dilakukan proses pelayanan tanpa menunggu waktu lama, sehingga pengguna jasa akan merasa puas karena pelayanannya cepat dan arus transportasi dipelabuhan semakin lancar.
2. Melakukan aksi pro aktif.
Jika ada perusahaan yang belum melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat sampai batas waktu tertentu, maka pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam akan melayangkan surat pemberitahuan kepada perusahaan tersebut termasuk komunikasi menggunakan saluran telepon. Jika perusahaan tidak mengambil perhatian yang serius maka tindakan untuk memberhentikan kegiatan bongkar muat berhubungan dengan kegiatan mereka, seperti jasa angkutan laut dan jasa barang bisa dilakukan.
3. Menyempurnakan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam telah

memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) *online* (SIMPONI) dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat.

4. Meningkatkan fasilitas secara berkala
Diantara perbaikan yang telah dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas pada proses penginputan kode *billing* seperti : penambahan jumlah unit PC dan juga personilnya, dan penyediaan akses internet yang baik.

4. KESIMPULAN

Beberapa faktor penyebab kurang optimal dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas sekitarnya menjadi terganggu dan tidak lancar. Namun disamping tersebut juga ada dari sisi internal seperti: keterbatasan fasilitas pendukung operasional, Belum tersedianya mesin ATM atau mesin EDC (Electronic Data Capture), dan keterbatasan jumlah personil yang melayani pengurusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada kegiatan bongkar muat. Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam adalah dari factor eksternal seperti pandemi Covid 19 yang belum berakhir, dan adanya kondisi cuaca yang kurang baik menyebabkan mobilitas kapal di pelabuhan Kota Batam

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam diantaranya adalah : memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, membuat aksi proaktif, menyempurnakan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan meningkatkan fasilitas pelayanan secara berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih kepada pihak KSOP Khusus Batam yang telah bersedia memberikan data dan waktu dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, M. A., (2014) *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com* di Samarinda, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- [2] Bosee, Syahrial (2015) *Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia*, Jakarta: TKP Koja.
- [3] D.A.Lasse, S.H., M.M. (2014) *Manajemen Kepelabuhanan*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. diakses 12 Mei 2020.
- [4] Iskandar, Ir.A.Sc. dkk (2013) *Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Keputusan Menteri Perhubungan. KM 33. Tahun 2001
- [6] Malihah, Siti. (2018) *Optimalisasi Kinerja Pegawai Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Belayar (Spb) Terkait Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di KSOP Kelas 1 Banten*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Diakses 24 April 2020.
- [7] Novitasari, Fitria. (2018) *Upaya Peningkatan Pelayanan Pembayaran PNBP dengan Menggunakan Metode E-Billing Guna Menekan Waktu Tunggu dalam Proses Keberangkatan Kapal di KSOP Kelas 1 Banten*. Jurnal Ketatalaksanaan Angkutan Laut. Diakses 23 April 2020.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016

tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada direktorat jenderal perhubungan laut.

- [9] Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan laut nomor HK/103/2/14/DJLP 16 tentang cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada direktorat jenderal perhubungan laut.
- [10] Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- [12] Zainuddin.(2013) Laporan Kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.KSOP Khusus Batam.